

# RENCANA KERJA TAHUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD 2024)



KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jln. DR. Cipto Mangunkusumo No.07 Selong Telp. (0376) 23669 Fax : (0376) 23669  
email : [disnakeswanlotim@gmail.com](mailto:disnakeswanlotim@gmail.com) Website : <http://nakeswan.lomboktimurkab.go.id/>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
NOMOR : 188.44/10.c/Nakeswan/2024

**TENTANG**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD)**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 telah ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah;  
b. bahwa dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026;  
c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024;.

Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023;
30. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RENJA OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : RENJA OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagai acuan dalam :
1. Menyusun rencana operasional pelaksanaan Program dan Kegiatan pada masing – masing bidang lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024;
  2. Melakukan evaluasi terhadap sejauhmana rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur yang diakomodir dalam RKPD Kabupaten Lombok Timur dibandingkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023;
  3. Evaluasi dan Pengendalian Program dan kegiatan agar mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
  4. Koordinasi Program dan Kegiatan antar sektor dan atau antar instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi;
  5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada Tanggal : 31 Maret 2024

**Kepala Dinas Peternakan dan Keswan  
Kabupaten Lombok Timur**



**Ir. H. Masyhur, SP**  
**NIP. 19661231 199203 1 150**

**Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :**

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 dapat terlaksana.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 secara umum memuat Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur; Rencana Program dan Rencana Kegiatan, Rancangan Pagu Anggaran Tahun 2024 dan Evaluasi kinerja tahun sebelumnya 2023 (n-1).

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan target-target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Diakui masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan rencana ini, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan bagi perbaikan di masa mendatang.

Selong, 31 Maret 2024

Kepala Dinas Peternakan dan Keswan  
Kabupaten Lombok Timur



**Ir. H. Masyhur, SP**

NIP. 19661231 199203 1 150

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2023) dan tahun berjalan .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	26
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	27
3.3. Program dan Kegiatan.....	28
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>36</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 21 ayat (3) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa salah satu tahapan dalam penyusunan Dokumen RKPD yaitu di dahului dengan

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan penyusunan RENJA SKPD mengacu kepada Rancangan Awal Dokumen RKPD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah dan dalam rangka memenuhi kewajiban perencanaan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

- Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 11);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur 2005-2025;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
  28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan

- Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
29. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

*Maksud dari penyusunan Rencana Kerja* ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2023, reviu pelaksanaan program / kegiatan tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

*Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD* adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika penyusunan RENJA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 secara garis besar sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu n-1 (Tahun 2023)
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 (tahun berjalan n-1)\* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

Tabel 1. Evaluasi Renja SKPD Tahun Lalu dan Realisasi tahun berjalan

Formulir E. 81 - Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PERIODE PELAKSANAAN : Januari s/d Desember 2023

OPD DAN KESEHATAN HEWAN

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPd :

No	Tujuan/ Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Thn 2023 (s.d. Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sd Renja OPD Th 2022			Target Kinerja dan Anggaran Kinerja OPD Th 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2023		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s/d Th 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD sd Th 2023 (%)		OPD Penang- gung Jawab				
					Satuan			Rp.			K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	12a=12/7x100%	13= (6 + 12)	14=13/5x100%	15															
1	Tujuan :																																		
	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Peternakan																																		
	Sasaran :																																		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas komoditi peternakan																																		
UR	3	27					89.286.989.875	0,00	56.878.245.232		31.444.646.433		1.629.087.237		7.240.316.522		4.058.997.653		12.547.911.642		-	25.476.313.054	38,71	81,02		-	82.354.558.286	613,66	92,24						
OPD	3	27		2			89.286.989.875	0,00	56.878.245.232		31.444.646.433		1.629.087.237		7.240.316.522		4.058.997.653		12.547.911.642		-	25.476.313.054	38,71	81,02		-	82.354.558.286	613,66	92,24						
Pr	3	27	01				22.455.973.315	100,00	19.095.098.932	100	8.384.862.433	17	1.458.742.237	31	2.635.900.353	20	1.710.903.333	28	2.323.461.572	97	8.129.007.495	96,95	96,95	100	27.224.106.427	100,00	121,23								
				201			39.566.280	131	18.823.000	100	5.000.000	-	-	33	1.648.000	-	-	-	-	33	1.648.000	32,96	32,96	164	20.471.000	164,06	51,74								
				01			15.686.040	37	6.967.000	4	2.000.000	-	-	2	1.055.000	-	-	-	-	2	1.055.000	52,75	52,75	39	8.022.000	328,69	51,14								
				06			23.880.240	38	11.856.000	5	3.000.000	-	-	1	593.000	-	-	-	-	0,99	593.000	19,77	19,77	39	12.449.000	262,16	52,13								
				202			21.386.459.125	198	15.746.578.262	100	8.167.213.293	18	1.430.417.101	32	2.620.031.488	21	1.685.980.817	28	2.266.898.154	98	8.003.327.560	97,99	97,99	296	23.749.905.822	296,18	111,05								
				01			20.774.420.805	133	15.329.555.422	102	7.931.811.093	18	1.411.771.401	33	2.558.811.488	21	1.654.149.217	28	2.180.940.354	100	7.805.672.460	98,41	98,41	234	23.135.227.882	229,22	111,36								
				03			595.070.200	45	407.673.840	12	230.271.200	1	18.336.700	3	61.220.000	2	31.831.600	4	84.891.800	10	196.280.100	85,24	85,24	56	603.953.940	154,34	101,49								
				05			7.585.080	35	4.957.000	2	2.000.000	0	67.000	-	-	-	-	-	1	535.000	1	602.000	30,10	30,10	36	5.559.000	598,62	73,29							
				07			9.383.040	58	4.392.000	16	3.131.000	1	242.000	-	-	-	-	-	3	531.000	4	773.000	24,69	24,69	62	5.165.000	163,30	55,05							
				203			161.429.280	200	106.057.000	100	51.009.600	15	7.487.500	24	12.100.000	13	6.600.000	27	13.750.000	78	39.937.500	78,29	78,29	278	145.994.500	278,29	90,44								
				06			161.429.280	104	106.057.000	4	51.009.600	1	7.487.500	1	12.100.000	1	6.600.000	1	13.750.000	3	39.937.500	78,29	78,29	107	145.994.500	892,76	90,44								





	3	27	02		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Persentase rata - rata pertumbuhan populasi ternak per Tahun	%	5	51.355.466.000	105	28.804.371.900	5	8.260.175.000	-	17.716.000	-	1.810.468.500	-	385.105.000	-	1.346.935.500	-	3.560.225.000	-	43,10	105	32.364.596.900	2.101,62	63,02		
	3	27	02	202	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Lombok Timur	Jenis	10	48.185.030.200	110	25.464.008.400	10	4.399.530.000	-	10.881.000	-	1.689.370.000	-	184.100.000	-	796.700.000	-	2.681.051.000	-	60,94	110	28.145.059.400	1.100,00	58,41		
	3	27	02	202	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2	46.983.982.000	102	25.015.930.400	2	4.389.530.000	-	9.900.000	-	1.689.370.000	-	184.100.000	-	796.700.000	-	2.680.070.000	-	61,06	102	27.696.000.400	5.100,00	58,95	
	3	27	02	202	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	1.201.048.200	101	448.078.000	1	10.000.000	0	981.000	-	-	-	-	-	0	981.000	9,81	9,81	101	449.059.000	10.109,36	37,39		
	3	27	02	203	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peternak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna	peternak	14000	137.974.720	13100	84.750.000	13.000	25.515.000	1.681	3.300.000	3.363	6.600.000	1.681	3.300.000	3.363	6.600.000	10.088	19.800.000	77,60	77,60	23.188	104.550.000	165,63	75,77		
	3	27	02	203	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	48	137.974.720	112	84.750.000	12	25.515.000	2	3.300.000	3	6.600.000	2	3.300.000	3	6.600.000	9	19.800.000	77,60	77,60	121	104.550.000	252,73	75,77	
	3	27	02	205	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan ternak dan Registrasi ternak	Kegiatan	2	3.032.461.080	102	3.255.613.500	2	3.835.130.000	0	3.535.000	-	114.498.500	-	197.705.000	-	543.635.500	0	859.374.000	0,09	22,41	102	4.114.987.500	5.100,09	135,70		
	3	27	02	205	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton	150	2.946.523.840	241	3.207.032.500	150	3.815.145.000	-	-	4	109.298.500	8	195.105.000	21	538.435.500	33	842.839.000	22,09	22,09	274	4.049.871.500	182,44	137,45	
	3	27	02	205	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	48	85.937.240	111	48.581.000	12	19.985.000	2	3.535.000	3	5.200.000	2	2.600.000	3	5.200.000	10	16.535.000	82,74	82,74	121	65.116.000	251,93	75,77	
	3	27	03		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana pertanian per tahun	%	15	11.002.313.000	115	5.469.950.300	15	1.527.061.500	-	43.100.000	-	598.236.000	-	64.625.500	-	257.660.000	-	963.621.500	-	63,10	115	6.433.571.800	766,67	58,47		
	3	27	03	202	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun	Unit	15	11.002.313.000	122	5.469.950.300	14	1.527.061.500	-	43.100.000	-	598.236.000	-	64.625.500	-	257.660.000	-	963.621.500	-	63,10	122	6.433.571.800	815,56	58,47		
	3	27	03	202	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	234.120.000	101	905.508.800	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	905.508.800	3.366,67	386,77		
	3	27	03	202	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	12	10.768.193.000	110	4.564.441.500	12	1.527.061.500	-	43.100.000	5	598.236.000	-	64.625.500	-	257.660.000	5	963.621.500	39,18	63,10	115	5.528.063.000	955,84	51,34	
	3	27	04		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM	Persen	100	4.298.427.960	100	3.492.889.100	100	13.272.547.500	1	109.529.000	17	2.195.711.669	14	1.898.363.820	65	8.619.854.570	97	12.823.459.059	96,62	96,62	100	16.316.348.159	100,00	379,59		
	3	27	04	201	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis per tahun	Persen	5	1.396.421.400	102	864.552.800	2	9.810.000.000	-	-	0	29.952.500	0	1.793.163.820	2	7.708.404.570	2	9.531.520.890	97,16	97,16	104	10.396.073.690	2.078,86	744,48		
	3	27	04	201	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	12	1.396.421.400	112	864.552.800	12	9.810.000.000	-	-	0	29.952.500	2	1.793.163.820	9	7.708.404.570	12	9.531.520.890	97,16	97,16	124	10.396.073.690	1.030,48	744,48	
	3	27	04	202	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pegeluaran ternak	Kali	167	239.697.320	163	143.623.600	55	440.117.500	9	76.879.000	18	143.200.000	9	73.100.000	18	146.200.000	54	439.379.000	98,73	99,83	217	583.002.600	130,20	243,22		



## Realisasi Tahun Berjalan 2024

### LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
Bidang Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN  
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
Bulan : FEBRUARI

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	BOBOT	REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN										SISA ANGGARAN (Rp)
				BULAN LALU		Fisik (%)	BULAN INI		Fisik (%)	S/D BULAN INI		Fisik (%)		
				Rp	%		Rp	%		Rp	%			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>100</b>	<b>120.220.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>112.720.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>232.940.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>4.267.060.000</b>	
	4.1.02.02.04.0002 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.556.128.000	57	89.070.000	3	3	74.120.000	3	3	163.190.000	6	6	2.392.938.000	
	4.1.02.02.07.0001 Retribusi Rumah Potong Hewan	1.943.872.000	43	31.150.000	2	2	38.600.000	2	2	69.750.000	4	4	1.874.122.000	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>24.102.171.058</b>	<b>100</b>	<b>460.925.816</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3.403.597.084</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>3.864.522.900</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>20.237.648.158</b>	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.220.074.658	47	460.925.816	4	4	609.096.984	5	5	1.070.022.800	2	2	10.150.051.858	
3	27 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.386.000	0,03		0	0	0	0	0	0	2	2	7.386.000	
3	27 01 2,01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.051.000	0,01		0	0	0	0	0	0	2	2	2.051.000	
	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.583.000	0,01		0	0		0	0	0	2	2	1.583.000	
	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	468.000	0,00		0	0		0	0	0	2	2	468.000	
3	27 01 2,01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.335.000	0,02		0	0	0	0	0	0	2	2	5.335.000	
	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.000	0,00		0	0		0	0	0	2	2	750.000	
	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	585.000	0,00		0	0		0	0	0	2	2	585.000	
	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	0,00		0	0		0	0	0	2	2	500.000	
	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	0,01		0	0		0	0	0	2	2	3.500.000	
3	27 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.915.684.758	45,29	460.925.816	4	4	609.096.984	6	6	1.070.022.800	2	2	9.845.661.958	
3	27 01 2,02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.655.337.218	44,21	460.925.816	4	4	609.096.984	6	6	1.070.022.800	2	2	9.585.314.418	
	5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	3.833.580.000	15,91	244.756.500	6	6	244.756.500	6	6	489.513.000	2	2	3.344.067.000	
	5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK	1.961.143.850	8,14	115.611.500	6	6	115.611.500	6	6	231.223.000	2	2	1.729.920.850	
	5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	421.987.050	1,75	27.109.720	6	6	27.001.250	6	6	54.110.970	2	2	367.876.080	
	5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	188.005.985	0,78	10.868.642	6	6	10.927.972	6	6	21.796.614	2	2	166.209.371	
	5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	382.575.000	1,59	21.725.000	6	6	21.725.000	6	6	43.450.000	2	2	339.125.000	
	5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS	758.100.000	3,15	5.220.000	1	1	5.220.000	1	1	10.440.000	2	2	747.660.000	
	5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	313.200.000	1,30		0	0	0	0	0	0	2	2	313.200.000	
	5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	66.225.000	0,27	4.415.000	7	7	4.415.000	7	7	8.830.000	2	2	57.395.000	
	5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	105.922.500	0,44	7.305.000	7	7	7.305.000	7	7	14.610.000	2	2	91.312.500	
	5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS	235.727.100	0,98	15.280.620	6	6	15.135.780	6	6	30.416.400	2	2	205.310.700	

					5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	119.710.260	0,50	8.255.880	7	7	8.328.300	7	7	16.584.180	2	2	103.126.080
					5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.657.660	0,06	373.188	3	3	344.898	3	3	718.086	2	2	12.939.574
					5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.380	0,00	2.921	6	6	2.868	6	6	5.789	2	2	43.591
					5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	24.433	0,00	1.845	8	8	1.916	8	8	3.761	2	2	20.672
					5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.547.429.000	6,42	0	0	0	122.321.000	8	8	122.321.000	2	2	1.425.108.000
					5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	383.000.000	1,59	0	0	0	26.000.000	7	7	26.000.000	2	2	357.000.000
					5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	227.806.400	0,95	0	0	0	0	0	0	0	2	2	227.806.400
					5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Rumah Potong Hewan	97.193.600	0,40	0	0	0	0	0	0	0	2	2	97.193.600
3	27	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		249.633.540	1,04	0	0	0	0	0	0	2	2	249.633.540	
					5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.094.700	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2	1.094.700	
					5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.170.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2	1.170.000	
					5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.125.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2	1.125.000	
					5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84.000.000	0,35	0	0	0	0	0	0	2	2	84.000.000	
					5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.282.096	0,04	0	0	0	0	0	0	2	2	9.282.096	
					5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.601.744	0,05	0	0	0	0	0	0	2	2	11.601.744	
					5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	102.960.000	0,43	0	0	0	0	0	0	2	2	102.960.000	
					5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.400.000	0,16	0	0	0	0	0	0	2	2	38.400.000	
3	27	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.000.000	0,01	0	0	0	0	0	0	2	2	2.000.000	
					5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.415.000	0,01	0	0	0	0	0	0	2	2	1.415.000	
					5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	585.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2	585.000	
3	27	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		8.714.000	0,04	0	0	0	0	0	0	2	2	8.714.000	
					5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	570.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2	570.000	
					5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	504.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2	504.000	
					5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2	500.000	
					5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.140.000	0,03	0	0	0	0	0	0	2	2	7.140.000	
3	27	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		58.133.600	0,24	0	0	0	0	0	0	2	2	58.133.600	
3	27	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		58.133.600	0,24	0	0	0	0	0	0	2	2	58.133.600	
					5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.600.000	0,03	0	0	0	0	0	0	2	2	6.600.000	
					5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.848.600	0,03	0	0	0	0	0	0	2	2	6.848.600	
					5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2	600.000	
					5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0	2	2	375.000	
					5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.000.000	0,14	0	0	0	0	0	0	2	2	33.000.000	

				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.710.000	0,04		0	0		0	0		0	2	2	10.710.000
3	27	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.749.300	0,31		0	0		0	0		0	2	2	75.749.300
3	27	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.029.800	0,01		0	0		0	0		0	2	2	3.029.800
				5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.029.800	0,01		0	0		0	0		0	2	2	3.029.800
3	27	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.994.500	0,05		0	0		0	0		0	2	2	11.994.500
				5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.461.900	0,02		0	0		0	0		0	2	2	4.461.900
				5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.157.600	0,02		0	0		0	0		0	2	2	5.157.600
				5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.375.000	0,01		0	0		0	0		0	2	2	2.375.000
3	27	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.785.000	0,01		0	0		0	0		0	2	2	2.785.000
				5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	237.000	0,00		0	0		0	0		0	2	2	237.000
				5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.548.000	0,01		0	0		0	0		0	2	2	2.548.000
3	27	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.005.000	0,02		0	0		0	0		0	2	2	6.005.000
				5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.005.000	0,02		0	0		0	0		0	2	2	6.005.000
3	27	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.240.000	0,01		0	0		0	0		0	2	2	3.240.000
				5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.240.000	0,01		0	0		0	0		0	2	2	3.240.000
3	27	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.695.000	0,20		0	0		0	0		0	2	2	48.695.000
				5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.450.000	0,01		0	0		0	0		0	2	2	3.450.000
				5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	45.245.000	0,19		0	0		0	0		0	2	2	45.245.000
3	27	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.250.000	0,14		0	0		0	0		0	2	2	33.250.000
3	27	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	0,01		0	0		0	0		0	2	2	2.200.000
				5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.200.000	0,01		0	0		0	0		0	2	2	2.200.000
3	27	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.690.000	0,11		0	0		0	0		0	2	2	25.690.000
				5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	480.000	0,00		0	0		0	0		0	2	2	480.000
				5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.400.000	0,02		0	0		0	0		0	2	2	5.400.000
				5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.610.000	0,05		0	0		0	0		0	2	2	12.610.000
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000	0,03		0	0		0	0		0	2	2	7.200.000
3	27	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.360.000	0,02		0	0		0	0		0	2	2	5.360.000
				5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000	0,01		0	0		0	0		0	2	2	2.440.000
				5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2.920.000	0,01		0	0		0	0		0	2	2	2.920.000
3	27	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.871.000	0,54		0	0		0	0		0	2	2	129.871.000
3	27	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.871.000	0,54		0	0		0	0		0	2	2	129.871.000
				5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.885.000	0,03		0	0		0	0		0	2	2	6.885.000

				5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.750.800	0,09		0	0		0	0	0	2	2	20.750.800
				5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	102.235.200	0,42		0	0		0	0	0	2	2	102.235.200
3	27	02			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>5.775.705.000</b>	<b>23,96</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.597.140.100</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>2.597.140.100</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3.178.564.900</b>
3	27	02	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.618.740.000	10,87		0	0	1.535.977.100	59	59	1.535.977.100	2	2	1.082.762.900
3	27	02	2,02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	15.140.000	0,06		0	0	0	0	0	0	2	2	15.140.000
				5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	8.550.000	0,04		0	0		0	0	0	2	2	8.550.000
				5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475.000	0,00		0	0		0	0	0	2	2	475.000
				5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	600.000	0,00		0	0		0	0	0	2	2	600.000
				5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	375.000	0,00		0	0		0	0	0	2	2	375.000
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.140.000	0,02		0	0		0	0	0	2	2	5.140.000
3	27	02	2,02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	2.603.600.000	10,80		0	0	1.535.977.100	59	59	1.535.977.100	2	2	1.067.622.900
				5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Kelompok Kerja (Pokja)	8.100.000	0,03		0	0		0	0	0	2	2	8.100.000
				5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.373.500	0,01		0	0		0	0	0	2	2	2.373.500
				5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.451.500	0,01		0	0		0	0	0	2	2	1.451.500
				5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.000.000	0,00		0	0		0	0	0	2	2	1.000.000
				5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.075.300.000	8,61		0	0	1.535.977.100	74	74	1.535.977.100	2	2	539.322.900
				5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000	0,02		0	0		0	0	0	2	2	5.000.000
				5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3.600.000	0,01		0	0		0	0	0	2	2	3.600.000
				5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	59.400.000	0,25		0	0		0	0	0	2	2	59.400.000
				5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.600.000	0,01		0	0		0	0	0	2	2	3.600.000
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.775.000	0,13		0	0		0	0	0	2	2	30.775.000
				5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	413.000.000	1,71		0	0		0	0	0	2	2	413.000.000
3	27	02	2,03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.860.000	0,13		0	0	0	0	0	0	2	2	30.860.000
3	27	02	2,03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	30.860.000	0,13		0	0	0	0	0	0	2	2	30.860.000
				5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	755.000	0,00		0	0		0	0	0	2	2	755.000
				5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	645.000	0,00		0	0		0	0	0	2	2	645.000
				5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.000	0,00		0	0		0	0	0	2	2	300.000
				5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.250.000	0,01		0	0		0	0	0	2	2	1.250.000
				5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3.250.000	0,01		0	0		0	0	0	2	2	3.250.000
				5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.800.000	0,08		0	0		0	0	0	2	2	19.800.000
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.860.000	0,02		0	0		0	0	0	2	2	4.860.000
3	27	02	2,05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hiauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.126.105.000	12,97		0	0	1.061.163.000	34	34	1.061.163.000	2	2	2.064.942.000

3	27	02	2,05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	19.505.000	0,08		0	0	0	0	0	0	2	2	19.505.000	
					5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	455.000	0,00		0	0	0	0	0	2	2	455.000	
					5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.000	0,00		0	0	0	0	0	2	2	300.000	
					5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.600.000	0,06		0	0	0	0	0	2	2	15.600.000	
					5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	0,00		0	0	0	0	0	2	2	1.050.000	
					5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.100.000	0,01		0	0	0	0	0	2	2	2.100.000	
3	27	02	2,05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.106.600.000	12,89		0	0	1.061.163.000	34	34	1.061.163.000	2	2	2.045.437.000	
					5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.300.200	0,02		0	0	0	0	0	2	2	4.300.200	
					5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.449.800	0,01		0	0	0	0	0	2	2	2.449.800	
					5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.250.000	0,01		0	0	0	0	0	2	2	1.250.000	
					5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.234.600.000	9,27		0	0	1.061.163.000	47	47	1.061.163.000	2	2	1.173.437.000
					5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000	0,03		0	0	0	0	0	2	2	8.000.000	
					5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000	0,08		0	0	0	0	0	2	2	20.000.000	
					5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	836.000.000	3,47		0	0	0	0	0	2	2	836.000.000	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.616.600.000	10,86		0	0	197.360.000	8	8	197.360.000	2	2	2.419.240.000	
3	27	03	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	2.616.600.000	10,86		0	0	197.360.000	8	8	197.360.000	2	2	2.419.240.000	
3	27	03	2,02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	616.600.000	2,56		0	0	197.360.000	32	32	197.360.000	2	2	419.240.000	
					5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Kelompok Kerja (Pokja)	5.100.000	0,02		0	0	0	0	0	2	2	5.100.000	
					5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.468.500	0,01		0	0	0	0	0	2	2	1.468.500	
					5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	581.500	0,00		0	0	0	0	0	2	2	581.500	
					5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	179.400.000	0,74		0	0	0	0	0	2	2	179.400.000	
					5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000	0,00		0	0	0	0	0	2	2	500.000	
					5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	421.600.000	1,75		0	0	197.360.000	47	47	197.360.000	2	2	224.240.000
					5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.950.000	0,03		0	0	0	0	0	2	2	7.950.000	
3	27	03	2,02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	2.000.000.000	8,30		0	0	0	0	0	0	2	2	2.000.000.000	
					5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.612.000	0,03		0	0	0	0	0	2	2	6.612.000	
					5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.388.000	0,04		0	0	0	0	0	2	2	9.388.000	
					5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.000.000	0,00		0	0	0	0	0	2	2	1.000.000	
					5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000	0,02		0	0	0	0	0	2	2	5.000.000	
					5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000	0,03		0	0	0	0	0	2	2	8.000.000	
					5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	500.000.000	2,07		0	0	0	0	0	2	2	500.000.000	
					5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.470.000.000	6,10		0	0	0	0	0	2	2	1.470.000.000	

3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.489.791.400	18,63		0	0	0	0	0	0	2	2	4.489.791.400
3	27	04	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	379.259.000	1,57		0	0	0	0	0	0	2	2	379.259.000
3	27	04	2,01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	379.259.000	1,57		0	0	0	0	0	0	2	2	379.259.000
					5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	379.000	0,00		0	0	0	0	0	0	2	2	379.000
					5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.140.000	0,00		0	0	0	0	0	0	2	2	1.140.000
					5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	372.600.000	1,55		0	0	0	0	0	0	2	2	372.600.000
					5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.140.000	0,02		0	0	0	0	0	0	2	2	5.140.000
3	27	04	2,02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	70.239.000	0,29		0	0	0	0	0	0	2	2	70.239.000
3	27	04	2,02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya_HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	70.239.000	0,29		0	0	0	0	0	0	2	2	70.239.000
					5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	529.000	0,00		0	0	0	0	0	0	2	2	529.000
					5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.140.000	0,00		0	0	0	0	0	0	2	2	1.140.000
					5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	66.000.000	0,27		0	0	0	0	0	0	2	2	66.000.000
					5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.570.000	0,01		0	0	0	0	0	0	2	2	2.570.000
3	27	04	2,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.430.350.000	14,23		0	0	0	0	0	0	2	2	3.430.350.000
3	27	04	2,03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3.430.350.000	14,23		0	0	0	0	0	0	2	2	3.430.350.000
					5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.233.000.000	5,12		0	0	0	0	0	0	2	2	1.233.000.000
					5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	48.150.000	0,20		0	0	0	0	0	0	2	2	48.150.000
					5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2.149.200.000	8,92		0	0	0	0	0	0	2	2	2.149.200.000
3	27	04	2,04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	609.943.400	2,53		0	0	0	0	0	0	2	2	609.943.400
3	27	04	2,04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	23.654.000	0,10		0	0	0	0	0	0	2	2	23.654.000
					5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	404.000	0,00		0	0	0	0	0	0	2	2	404.000
					5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	360.000	0,00		0	0	0	0	0	0	2	2	360.000
					5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250.000	0,00		0	0	0	0	0	0	2	2	250.000
					5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.800.000	0,08		0	0	0	0	0	0	2	2	19.800.000
					5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.840.000	0,01		0	0	0	0	0	0	2	2	2.840.000
3	27	04	2,04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	586.289.400	2,43		0	0	0	0	0	0	2	2	586.289.400
					5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.654.400	0,01		0	0	0	0	0	0	2	2	1.654.400
					5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.170.000	0,00		0	0	0	0	0	0	2	2	1.170.000
					5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.000.000	0,00		0	0	0	0	0	0	2	2	1.000.000
					5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000	0,01		0	0	0	0	0	0	2	2	2.625.000
					5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	172.800.000	0,72		0	0	0	0	0	0	2	2	172.800.000
					5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.140.000	0,03		0	0	0	0	0	0	2	2	7.140.000
					5.1.02.05.01.0006 Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	399.900.000	1,66		0	0	0	0	0	0	2	2	399.900.000



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian rencana kerja program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 telah sesuai dengan target kinerja bahkan rata – rata pecapaian fisik program dan kegiatan 99,73 % walaupun realisasi keuangan hanya 81,02%. Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 telah sesuai dengan RENJA SKPD dan dapat merealisasikan semua Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan telah dimasukkan kedalam Plafon Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2024.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1. Terhadap Kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 telah mengalami beberapa kemajuan penting, Sebagai gambaran sesuai dengan tabel 2.1. (terlampir) tentang Pencapaian Kinerja sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023, maka dapat diuraikan sebagai berikut : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 7 kegiatan yang menunjang pelaksanaan program utama pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dengan sasaran utama adalah berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana peternakan dan optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran mulai dari Penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan laporan kinerja bulanan, triwulan maupun tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

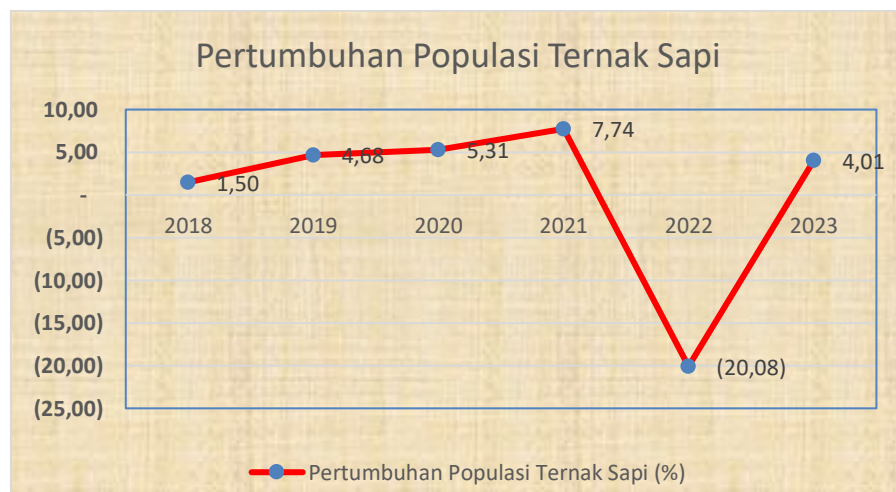
Secara umum program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sangat mendukung dalam penyediaan layanan perkantoran dan penyediaan prasarana dan sarana perkantoran dengan capaian 96,95 % dari target 100 % tahun 2023. Tidak tercapainya target disebabkan karena kurangnya anggaran pemerintah daerah. Namun secara umum rata – rata pelaksanaan kegiatan penunjang baik dalam bentuk administrasi, pelayanan jasa kantor dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dapat berjalan lancar tanpa ada kendala dalam pelaksanaannya, bahkan realisasi secara fisik pada sub kegiatan rata – rata mencapai 96,95 %.

## 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian merupakan prioritas utama dalam mengemban misi peternakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 yaitu meningkatkan produksi komoditi peternakan unggulan daerah untuk menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal.

Sasaran utama program ini adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ternak yang direncanakan sebesar 5 % per tahun dengan barometer utama adalah peningkatan populasi ternak, terutama ternak sapi sebagai komoditi unggulan Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertera dalam grafik berikut :

Garafik. 3.3. Pertumbuhan Populasi Ternak di Kabupaten Lombok Timur



Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan (2024)

Dari grafik di atas memberikan gambaran bahwa trend peningkatan populasi ternak Sapi dalam 3 tahun terakhir rata – rata berada diatas 5 % sebagaimana yang di targetkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023. Bila dibandingkan dengan rata – rata pertumbuhan populasi ternak sapi secara nasional periode 2016 – 2020 yaitu sebesar 2,23 %, maka hal ini merupakan indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menjaga kelestarian sumber daya ternak dan produksi komoditi peternakan.

Dalam pelaksanaan program ini, ditargetkan anggaran sebesar Rp. 8.260.175.000,- untuk tiga Kegiatan dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 3.560.225.000,- (43,10%) dan realisasi fisik program dan kegiatan mencapai 95 %.

Pencapaian target peningkatan populasi ternak yang menjadi indikator program ini didorong oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diarahkan untuk menjamin kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik ternak yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Maka salah satu bentuk menjaga kelestarian sumber daya ternak adalah melalui kegiatan pendistribusian atau bantuan bibit ternak kepada masyarakat yang disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayahnya masing – masing.

Pada tahun 2023 ditargetkan terdistribusi bibit ternak sebanyak 10 jenis ternak dengan berbagai jenis ternak seperti Sapi Bibit, Sapi Bakalan, Sapi indukan Bali, Sapi Persilangan, Ternak Kambing, Ayam dan itik.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.3. Realisasi distribusi ternak tahun 2023**

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1	Sapi Bibit	5
2	Sapi Bakalan	21
3	Sapi Indukan	24
4	Sapi Eksotik	10
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>
1	Kambing PE	44
2	Kambing Batang	72
<b>Jumlah</b>		<b>116</b>
1	Ayam Kampung	517
2	Ayam Petelur	13.979
3	Ayam Broiler	3.200
<b>Jumlah</b>		<b>17.696</b>

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan 2024

- b. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten

Selain Pejaminan kemurnian SDG ternak maka yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama adalah peningkatan kelahiran ternak melalui program prioritas nasional yaitu SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditi Andalan Negeri). Dalam

mendukung program tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur mendapatkan 44.990 dosis straw dari target 45.000 pelayanan. Realiasi pelaksanaan fisik kegiatan ini telah mencapai 100 % dengan realiasi Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 48.433 Dosis atau 108 % dan tingkat kelahiran ternak hasil IB sebanyak 14.839 ekor. Sebagaimana disajikan dalam table berikut ini :



Tabel 3.4 Realiasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Sapi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

Bulan	Akseptor IB	Pelayanan IB	Kelahiran
(1)	(2)	(3)	(5)
<b>Januari</b>	4.706	4.718	2.327
<b>Februari</b>	4.075	4.302	2.003
<b>Maret</b>	3.294	3.725	558
<b>April</b>	2.554	2.960	167
<b>Mei</b>	2.709	3.262	3.522
<b>Juni</b>	3.402	4.027	620
<b>Juli</b>	3.123	3.793	669
<b>Agustus</b>	3.641	4.480	4.314
<b>September</b>	3.783	4.629	3.677
<b>Oktober</b>	4.557	5.110	3.219
<b>November</b>	3.619	4.103	5.501
<b>Desember</b>	3.325	3.324	5.002
<b>Total</b>	<b>42.788</b>	<b>48.433</b>	<b>31.579</b>

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2024

- c. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

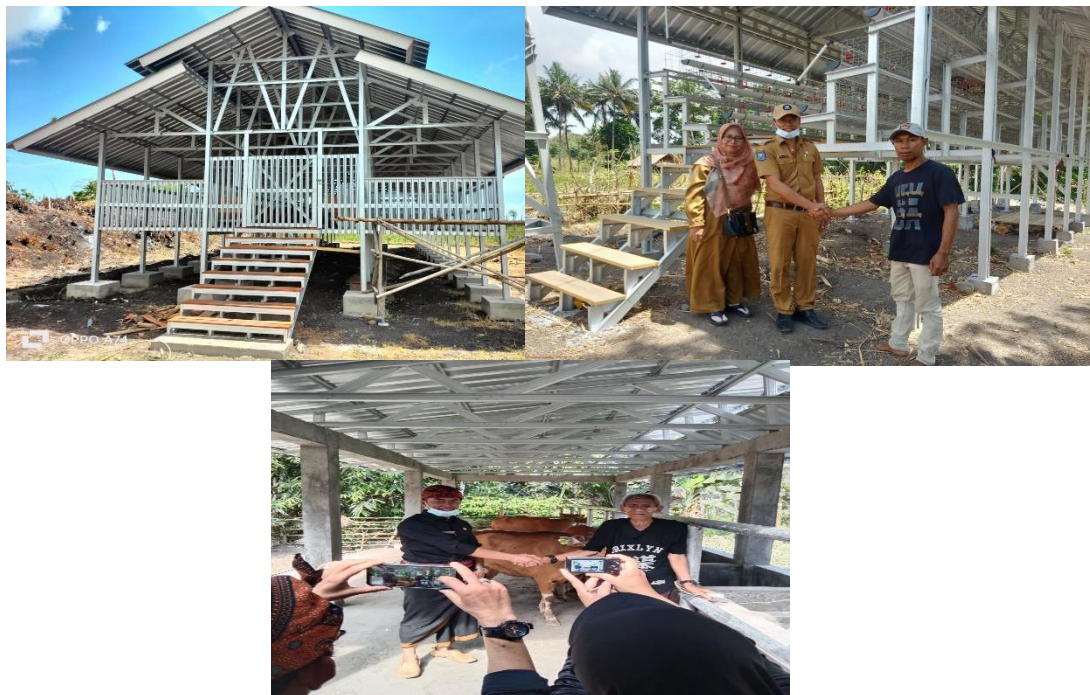
Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

telah di distribusikan pakan ternak unggas sebanyak 153,5 ton kepada 19 kelompok peternak dan 1,85 ton pakan puyuh untuk 1 kelompok peternak.

### 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan prasarana peternakan dilapangan maka yang menjadi sasaran program ini adalah peningkatan kualitas prasarana peternakan baik prasarana perkandangan, prasarana perkantoran maupun prasarana budidaya peternakan dengan target 15 % per tahun.

Pada tahun 2023 ditargetkan pembangunan perkandangan kelompok sebanyak 12 unit dengan anggaran program sebesar Rp. 3.524.575.000 ,- yang digunakan untuk pembangunan kandang ternak sebanyak 4 Unit terdiri dari 2 unit kandang ayam, 1 unit kandang sapi dan 1 unit kandang kambing. Pelaksanaan kegiatan telah mencapai fisik 100 % dengan realisasi anggaran program dan kegiatan sebesar Rp. 963.621.500 (63,10%). Prasarana yang dibangun tersebut telah difungsikan untuk budidaya ternak baik sapi, kambing maupun ayam. Masih rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena kurangnya anggaran pemerintah daerah sehingga pembayarannya tertunda atau menjadi hutang jatuh tempo.



#### **4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Sasaran pokok program ini adalah terkendalinya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang ditargetkan sebesar 100 %. Dalam pelaksanaannya ditunjang oleh 5 kegiatan pokok yang meliputi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.

Pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak yang merupakan salah satu pintu masuknya penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis (menular ke manusia) terutama dari daerah lain seperti Pulau Jawa, Bali maupun dari Pulau Sumbawa, dimana lalu lintas ternak ini intensitasnya sangat tinggi sehingga resiko penularan penyakit menjadi tinggi, maka salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan melakukan pemeriksaan Kesehatan hewan di daerah perbatasan dengan memberikan rekomendasi status kesehatan hewan baik yang masuk maupun yang keluar Kabupaten Lombok Timur.

Program ini bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah berkembangnya berbagai penyakit menular (Zoonosis) pada ternak yang dapat mengganggu kesehatan ternak dan masyarakat veteriner, dalam bentuk pelayanan aktif, pelayanan semi aktif dan pelayanan pasif dengan target out put yang dihasilkan adalah terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari Penyakit Hewan Menular.

Indikator utama program ini adalah terjaminnya 100% kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari penyakit hewan menular yang strategis atau bersifat zoonosis (menular ke manusia) di Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2023 Kabupaten Lombok Timur masih bebas dari penyakit menular strategis seperti Anthrax, Brucellosis, Rabies dan Penyakit Ngorok (SE).

Pada tahun 2023 terjadi pemasukan ternak Sapi dan Kerbau dari Pulau Sumbawa sebanyak 4.734 ekor dengan tujuan sebagai ternak potong di Kabupaten Lombok Timur. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan terhadap pemasukan tetapi

dilakukan di Rumah Potong Hewan baik yang dikuasai oleh Pemerintah maupun tempat pemotongan hewan yang dikuasai oleh swasta.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 5 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan target program yaitu persentase terjaminnya Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner dari penyakit hewan menular sebesar 100 % dan direalisasikan sebesar 97%. Target kinerja tidak tercapai karena ada sebagian kecil peternak yang belum terlayani secara maksimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan terutama sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis telah dilakukan secara terstruktur mulai dari Pemerintah Pusat sampai di tingkat Desa dengan membentuk Satgas pengendalian PMK dan Alhamdulillah atas ijin Allah bahwa pengendalian dan Pengobatan penyakit PMK telah berhasil dilakukan sehingga sampai akhir tahun 2022 Kabupaten Lombok Timur tidak ada lagi kasus baru PMK. Dalam pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan intensitas pengawasan lalulintas ternak yang masuk maupun keluar dari Lombok Timur sebanyak 63 kali melebihi target yang ditetapkan yaitu 55 kali.

Pada kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Jumlah Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang ditargetkan sebanyak 50 orang pelaku usaha hanya dapat direalisasikan sebanyak 32 orang pelaku usaha hal disebabkan karena masih rendahnya daya beli masyarakat dan dampak dari wabah PMK.

Dampak wabah PMK ini juga telah menyebabkan tertundanya realiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau sehingga pada sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target dari 12 laporan kegiatan hanya terealisasi 8 laporan.

Tabel. 3.5. Realisasi Pelayanan Kesehatan Ternak di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No	Puskesmas	Pelayanan Kesehatan Hewan Berdasarkan Kelompok Hewan								
		Ternak Besar			Jumlah (ekor)	Ternak Kecil		Jumlah (ekor)	Unggas	Hewan Kesayangan
		Sapi	Kerbau	Kuda		Kambing	Domba			
1	Selong	3.224	-	12	3.236	664		664		23
2	Masbagik	2.729		27	2.756	112		112		9
3	Pringgasela	2.722	-		2.722	7		7		1
4	Sukamulia	2.304	-		2.304	91		91		7
5	Aikmel	3.042	-		3.042	70		70		6
6	Wanasaba	4.369	-		4.369	60		60		5
7	Pringgabaya	2.217	507	50	2.774	85		85		3
8	Sambalia	2.448	665		3.113	-		-		
9	Suela	3.026	-		3.026	666		666		1
10	Semalun	4.906	-		4.906	-	-			
11	Sikur	3.111	-		3.111					1
12	Terara	3.681		2	3.683					4
13	Montong Gading	3.064			3.064					6
14	Sakra	3.621	-	-	3.621	282		282		
15	Sakra Timur	2.142	4	6	2.152	5.784		5.784		
16	Keruak	1.668	732	36	2.436	6.277		6.277		1
17	Jerowaru	1.815	1.774		3.589	3.260		3.260		
JUMLAH		50.089	3.682	133	53.904	17.358		17.358		67

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan, 2024

## 5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengurusan ijin usaha di bidang peternakan seperti Rekomendasi ijin Usaha Pemotongan Hewan, Rekomendasi Ijin Usaha Pemeliharaan Ternak, Pembangunan Kandang, Perusahaan Peternakan dan lain – lain.

Program Perizinan Usaha Pertanian terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengurusan ijin usaha di bidang peternakan seperti Rekomendasi ijin Usaha Pemotongan Hewan, Rekomendasi Ijin Usaha Pemeliharaan Ternak, Pembangunan Kandang, Perusahaan Peternakan dan lain – lain.

Indikator utama program ini adalah ketersediaan Jumlah Unit usaha Peternakan yang legal yaitu sebanyak 23 Unit Usaha yang melakukan pengurusan ijin maupun perpanjangan ijin tahun 2023. Dinas Peternakan dan Kesehatan dalam hal ini, hanya mengeluarkan rekomendasi sedangkan yang membuat atau menerbitkan perijinan dibawah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.



Selain pemberian rekomendasi kepada perusahaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur juga memberikan rekomendasi pemasukan ternak dari Pulau Sumbawa untuk dipotong di Lombok Timur. Untuk tahun 2023 program ini tidak mendapatkan alokasi anggaran karena keterbatasan APBD.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu – Isu penting dan strategis yang selama ini masih terjadi dalam pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur antara lain :

- a. Terhadap anggaran SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur setiap tahun terjadi peningkatan namun masih terbatas pada kegiatan – kegiatan pendistribusian ternak sedangkan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas SDM aparat dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah sangat minim..
- b. Masih rendahnya Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Timur terutama indikator Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.
- c. Tantangan yang masih cukup besar dalam meningkatkan pelayanan di bidang peternakan adalah peningkatan kualitas SDM peternak dan mentalitas aparat terutama yang langsung terkait dengan pendampingan dan penyuluhan sehingga produktivitas peternakan dapat meningkat.
- d. Sebagai catatan penting Program dan Kegiatan Prioritas yang telah terintegrasi antara hulu dan hilir serta berada dalam satu kawasan potensial perlu terus kita pertahankan eksistensinya sebagai berdampak pada peningkatan hasil pembangunan peernakan.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan Hasil analisis terhadap kebutuhan dan penganggaran SKPD, maka terhadap Rancangan awal RKPD pada Program dan Kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam rancangan awal RKPD telah diusulkan semua Program dan Kegiatan dengan total anggaran awal yang direncanakan sebesar Rp 24.306.737.133,-.. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka pembiayaan Program dan Kegiatan difokuskan pada usulan pembiayaan pada APBD Kabupaten Lombok Timur 2024.
- b. Beberapa pertimbangan dalam menentukan Sumber pembiayaan Program dan Kegiatan antara lain (1) Apabila program dan kegiatan tersebut bersifat Nasional dan menjadi target pusat maka Rencana pembiayaannya diarahkan bersumber dari APBN seperti Pengembangan Kawasan, UPSUS SIWAB, dll; dan apabila kegiatan menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 maka diarahkan ke Provinsi NTB.
- c. Untuk lebih rinci terhadap rancangan awal dan hasil analisis RKPD disajikan sebagaimana terlampir.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan terhadap Usulan program dan Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui 3 (tiga) model usulan yang diterima oleh SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur yaitu :

- Melalui Musrenbang yang dimulai dari tingkat Dusun, kemudian Desa, Kecamatan dan selanjutnya difinalkan pada Musrenbang Kabupaten.
- Melalui Musrebangtan yang dilakukan khusus oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan usulan masyarakat melalui Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Tingkat Desa dan Kecamatan yang selanjutnya difinalkan di tingkat Kabupaten melalui Musrenbang Pertanian.
- Melalui Proposal – proposal yang diusulkan oleh Kelompok Tani baik bidang pertanian maupun bidang peternakan.

Usulan – usulan tersebut telah selaras dengan isu – isu penting yang berkembang di masyarakat maupun kebijakan secara Nasional seperti peningkatan Produksi, Produktivitas komoditi Peternakan, SIKOMANDAN, Pengembangan kawasan dan Infrastruktur Prasarana dan Sarana Peternakan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang akan menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024-2026 atau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Isue Jangka Menengah dan Jangka Pendek dalam Pembangunan Nasional adalah Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pencapaian Swasembada Khususnya Swasembada Daging 2034.

Hal tersebut telah sesuai dengan salah satu Misi Kepala Daerah yaitu Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

#### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD**

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Periode 2024-2026, antara lain :

**Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :**

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Ternak.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditi peternakan;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparat Peternakan;

**Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :**

1. Meningkatnya Produksi Daging dan Telur.
2. Meningkatnya Kuantitas Ternak.
3. Meningkatnya Kualitas Ternak.
4. Meningkatnya Daya saing komoditi peternakan.
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
6. Peningkatan Pemasaran Ternak;
7. Peningkatan pemasaran produk olahan hasil peternakan;
8. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Perkantoran;

### **3.3. Program dan Kegiatan**

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain :
  1. Program dan Kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan prioritas baik prioritas nasional maupun prioritas daerah, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten.
  2. Program dan Kegiatan yang diusulkan mempunyai efek domino yang dapat mengungkit program dan kegiatan lain baik antar sub sektor maupun sektor lain.
  3. Program dan Kegiatan yang diusulkan merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat/petani dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan produktivitas ternak.
- b. Secara garis besar Program dan Kegiatan 2024 yang direncanakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

**FORMAT : MATRIK RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN BERDASARKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Out come) KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2024	
									TARGET (K)	(Rp.)
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			24.306.737.133,00
		3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			24.306.737.133,00
		3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	100 Persen	8.607.582.628,00
		3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan		5.108.000,00
		3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.043.200,00
		3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	3.064.800,00
		3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	100%	8.395.754.746,00

		3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/bulan	8.186.033.342,00
		3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	204.479.574,00
		3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.043.200,00
		3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	3.198.630,00
		3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	100 Persen	29.180.574,00
		3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	29.180.574,00
		3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	100 Persen	42.910.265,00
		3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.192.500,00
		3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	5.108.000,00

		3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	2.845.156,00
		3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	150 Paket	5.113.108,00
		3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1.654.992,00
		3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	24.996.509,00
		3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan asset/barang milik daerah	100 Persen	46.993.600,00
		3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	26.561.600,00
		3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20.432.000,00
		3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	33.692.368,00
		3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.124.928,00
		3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.255.120,00
		3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.312.320,00
		3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	53.943.075,00

		3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	38.619.075,00
		3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.324.000,00
		3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas	65 Persen	1.822.636.560,00
		3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya genetik hewan yang dipelihara di Lombok Timur	10 Jenis	151.809.760,00
		3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	10.216.000,00
		3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	10 laporan	141.593.760,00
		3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peternak yang menggunakan teknologi peternakan tepat guna	14.000 peternak	26.066.124,00
		3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	26.066.124,00



		3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyediaan pakan ternak dan registrasi ternak	2 Kegiatan	1.644.760.676,00
		3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	20.416.676,00
		3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	3 Laporan	1.624.344.000,00
		3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana peternakan pertanian	1,5 Persen	183.275.040,00
		3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana peternakan yang terbangun	15 unit	183.275.040,00
		3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	134.238.240,00
		3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	49.036.800,00
		3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM	100 Per	13.691.946.906,00
		3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan	Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis pertanian	5 Persen	9.960.600.000,00

							Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
		3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	9.960.600.000,00
		3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Intensitas pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak	167 Kali	449.603.606,00
		3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	12 Laporan	449.603.606,00
		3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengambilan sampel per populasi	1 Persen	2.615.066.140,00
		3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	2.615.066.140,00
		3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaku unit usaha hewan dan produk hewan	50 orang	606.677.160,00
		3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	51.080.000,00

		3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi	12 Unit Usaha	555.597.160,00
		3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pemotongan ternak tercatat di RPH/TPH	36.000 ekor	60.000.000,00
		3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	12 Unit	60.000.000,00
		3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah ijin usaha hewan yang direkomendasikan untuk registrasi dan penerbitan ijin baru	12 Dokumen	1.295.999,00
		3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	12 Laporan	1.295.999,00
		3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	12 Dokumen	1.295.999,00
<b>TOTAL</b>										<b>24.306.737.133,00</b>

## BAB IV. PENUTUP

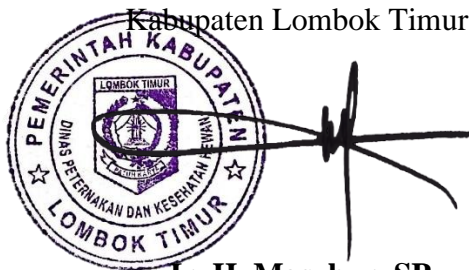
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur ini memuat tentang keadaan / kondisi umum daerah, isu strategis dan permasalahan, prioritas program pembangunan dan rencana kegiatan serta anggarannya pada Tahun 2024.

Renja SKPD ini disusun dalam rangka untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas serta efisiensi dan efektivitas setiap pelaksanaan program dan kegiatannya yang bersumber dari pembiayaan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

Dengan adanya Renja SKPD ini diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023, sehingga prioritas pembangunan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur umumnya dan lebih khusus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur

Selong, 31 Maret 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Lombok Timur,



**Ir. H. Masyhur, SP**  
**NIP. 19661231 199203 1 150**